

MATERI 4

CELAH KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Coach Dr. Yanuar Wijayanto, M.T. CT CPEC CCMs CPPP CTNLP CH CHt



HAKORDIA
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA 2025
Satukan Aksi Basmi Korupsi



I. NAMA :

Dr YANUAR WIJAYANTO, M.T. CPEC CCMs CPPP CT.NLP

PROFESI :

- WIDYAIISWARA AHLI MADYA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
- PENYULUH ANTI KORUPSI SERTIFIKASI KPK
- PENGAJAR PENGADAAN BARANG/JASA Level 1,2,3,4 LKPP
- ADVISOR PBJ LKPP
- PROFESSIONAL COACH
- TRAINER BNSP
- TRAINER NEO NLP SOCIETY
- FOUNDER YW INSTITUTE

SOCIAL MEDIA :



085641250901

WhatsApp



Yanuar Wijayanto



yanuarwe

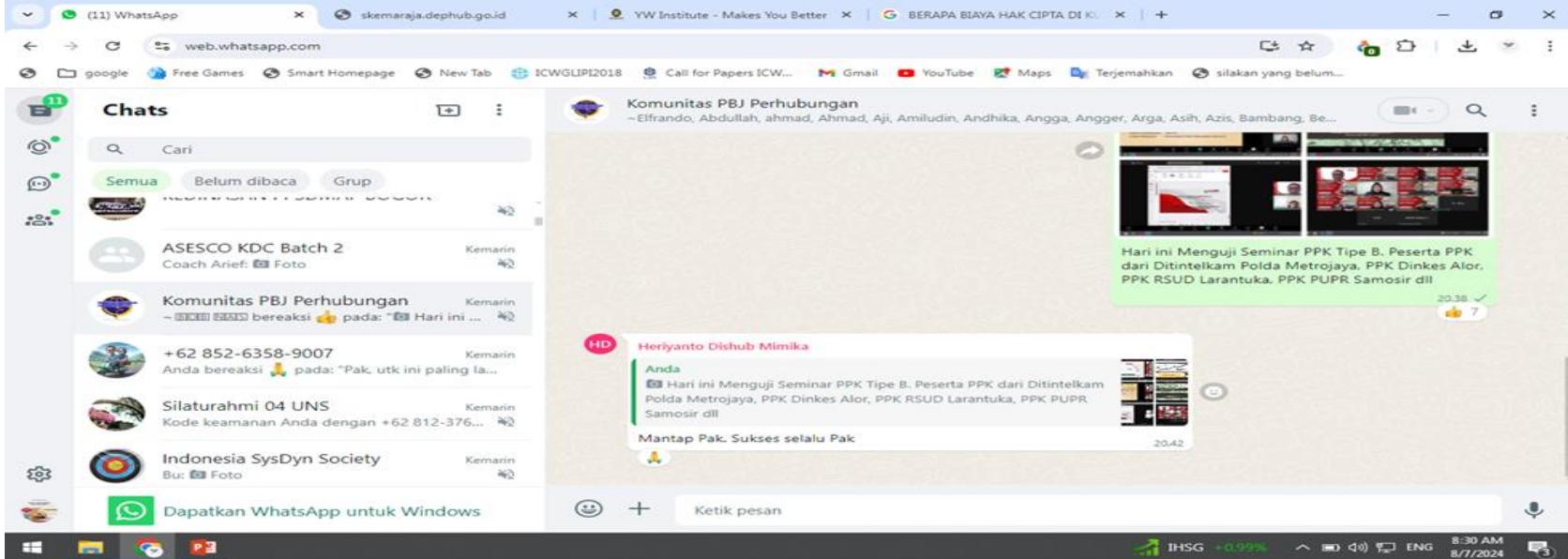


yanuar_we



ywinstitute.com





ASTA CITA

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



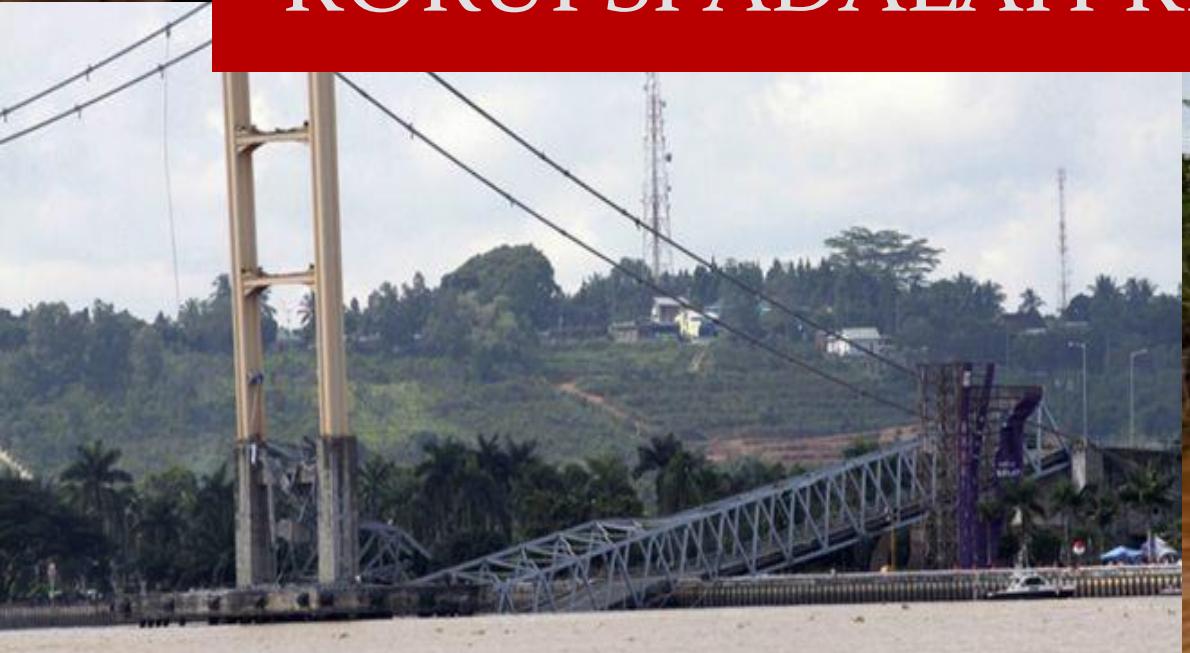
PELUNCURAN PROGRAM PELATIHAN ANTIKORUPSI DAN PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PBJ



Suharti, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, memberikan pengantar peluncuran pelatihan terbaru dari Pusat SDM PBJ LKPP. Pelatihan terbaru terkait dengan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa. Dalam sambutan tersebut, Suharti menyampaikan bahwa pelatihan ini sebagai upaya dalam mendukung terwujudnya Asta Cita Presiden Prabowo.



KORUPSI ADALAH KEJAHATAN LUAR BIASA

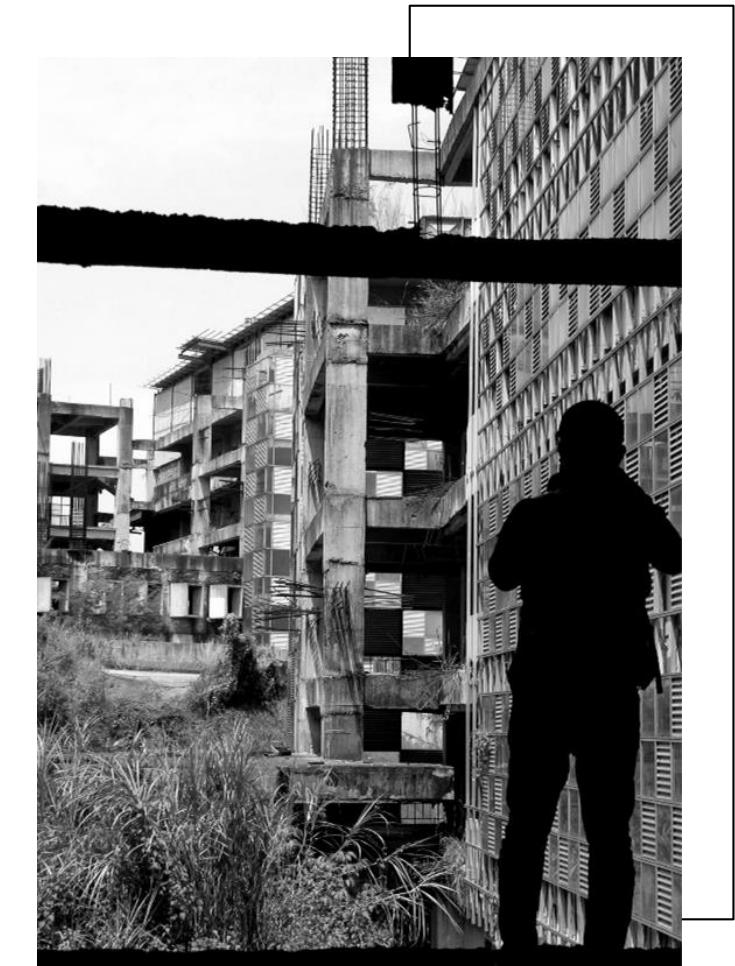


KEJAHATAN LUAR BIASA

1. Berpotensi dilakukan oleh setiap orang.
 2. Random target/victim.
 3. Kerugiannya besar dan meluas.
 4. Terorganisasi atau oleh organisasi.
- + bersifat lintas negara (Korupsi, TPPU, Terorisme, Pelanggaran berat HAM, dan Narkotika)



DAMPAK KORUPSI

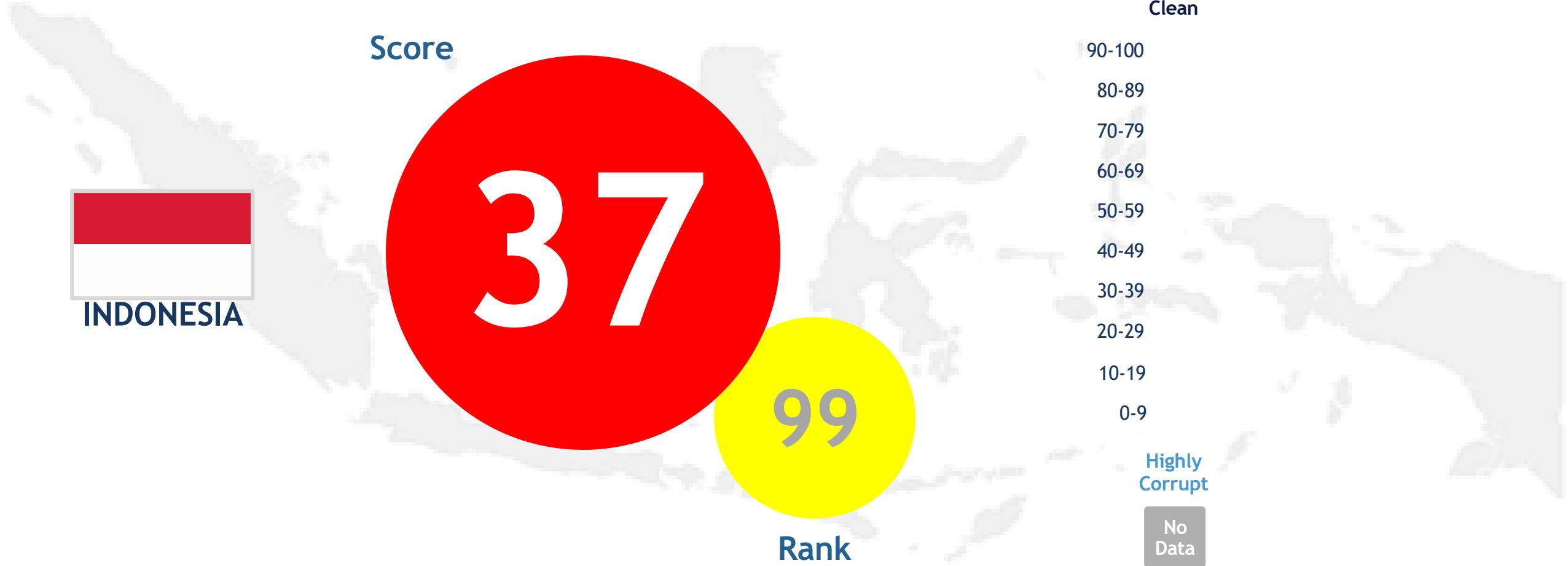


KEMISKINAN

KERUSAKAN ALAM

BIAYA EKONOMI TINGGI

CPI INDONESIA 2024



CPI 2024: ASEAN

Rank	CPI 2024	Country	CPI 2023	
3	84	Singapore	83	↑
57	50	Malaysia	50	↔
73	44	Timor Leste	43	↑
88	40	Vietnam	41	↓
99	37	Indonesia	34	↑
107	34	Thailand	35	↓
114	33	Laos	28	↑
114	33	Philippines	34	↓
158	21	Cambodia	22	↓
168	16	Myanmar	20	↓

KOMPAS.com News Pemilu IKN **NEW** Tekno Otomotif Bola Lifestyle Tren Lestari Health Money Properti Food UMKM Edukasi Travel

BAGIKAN:     Wakil Ketua KPK: Hampir 90 Persen Perkara Korupsi yang Disidangkan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa KOMENTAR:  16

Kompas.com / News / Nasional

Wakil Ketua KPK: Hampir 90 Persen Perkara Korupsi yang Disidangkan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Kompas.com - 12/03/2024, 11:28 WIB



Syakirun Ni'am, Novianti Setuningsih

Tim Redaksi



4



16



KPK Telusuri Aliran Uang Tersangka Korupsi Proyek Jalan di Kalimantan Timur

KPK memeriksa tiga saksi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Kalimantan Timur.

2 November 2024 | 11.45 WIB



news.detik.com/berita/d-7700846/awang-faroe-tutup-usia-kasus-dihentikan-kpk

[Home](#) [Berita](#) [Jabodetabek](#) [Internasional](#) [Hukum](#) [detikX](#) [Kolom](#) [Blak blakan](#) [Pro Kontra](#) [Infografis](#) [Foto](#) [Video](#)

Adsmart Terpopuler Daerah Hoax or Not Suara Pembaca Hoeng Awards 2025* Pilkada 2024*

detikNews > Berita

Awang Faroe Tutup Usia, Kasus Dihentikan KPK

Tim detikcom - detikNews

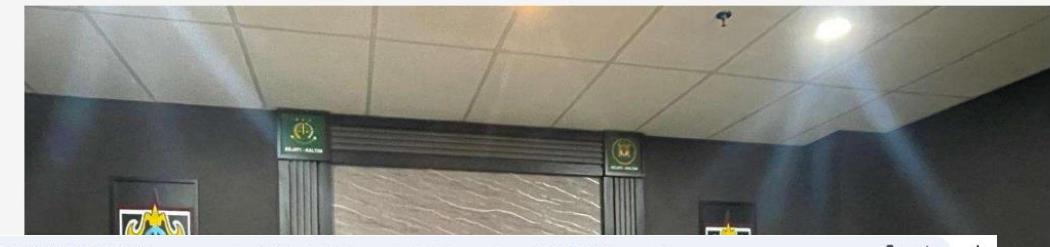
Senin, 23 Des 2024 22:08 WIB



Daerah

Kejati Kaltim Berhasil Tangani Puluhan Kasus Korupsi 2024

Oleh: Boy Saputra Editor: Alfian 09 Dec 2024 - 12:58 Samarinda



IKN.KOMPAS.COM/READ/2024/11/25/142805887/Hingga-november-2024-ada-13-laporan-terkait-dugaan-korupsi-di-kaltim?page=all

KOMPAS.com News Nusaraya Tekno Otomotif Bola Lifestyle Tren Lestari Health Money Properti Edukasi Travel

BAGIKAN: [Facebook](#) [X](#) [WhatsApp](#) [Telegram](#) Hingga November 2024, Ada 13 Laporan Terkait Dugaan Korupsi di Kaltim

KOMENTAR: [Komparasi](#)

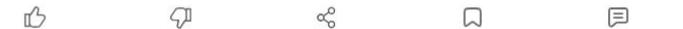
Kompas.com / IKN / News

Hingga November 2024, Ada 13 Laporan Terkait Dugaan Korupsi di Kaltim

Kompas.com - 25/11/2024, 14:28 WIB



Hilda B Alexander
Penulis



Kredivo

Keunikan memikat. Kemampuan hebat.

Berita, Headline, Lokal

Dugaan Praktek Kotor di Pemkab Bangka Mulai dari Proyek Makan Minum Bangka Setara Hingga Jual Beli Jabatan



Oby
Januari 24, 2024

Beranda

Tak Berkategori
Ratusan ASN di Pemalang Terkena Sanksi Terkait Kasus Beli Jabatan, LSM LI TIPIKOR Dukung Penuh Keputusan Bupati
Haluan Indonesia
24 Desember 2023



Tentang Kami Susunan Redaksi Pimum MSM

Homepage / Daerah

Terjadi Lagi Jual Beli Jabatan di Tiga OPD di Kabupaten OKU

Redaksi July 19, 2024
Daerah



detiknews

Home Berita Jabodetabek Internasional Hukum

30 Tersangka Tes ASN Curang Diduga Terima Suap hingga Rp 600 Juta

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews

Senin, 25 April 2022 12:34 WIB

BAGIKAN

Komentar

detiksumbagsel

Home Berita Sepakbola Hukum & Kriminal Buda

Hukum dan Kriminal detikSumbagsel /

Sumatera Selatan
Kejati Sumsel Geledah Rumah Tersangka Gratifikasi Oknum PNS Inspektorat

Irawan - detikSumbagsel

Kamis, 18 Jan 2024 20:20 WIB

BAGIKAN

detiknews

Home Berita Jabodetabek Internasional H

KPK Panggil PNS Kemenhub Ja Saksi Kasus Suap Jalur KA

Mulia Budi - detikNews

Jumat, 15 Des 2023 13:25 WIB

BAGIKAN



KASUS DITJEN PAJAK

Dua Pegawai Pajak Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Puluhan Miliar Rupiah

Yulmanizar dan Febrian didakwa menerima suap dan gratifikasi miliaran rupiah dari sejumlah wajib pajak perusahaan.

Audio Berita 7 menit

Oleh NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

25 Januari 2024 18:09 WIB · 4 menit baca

ANTARA

Hukum Ekonomi Metro Sepakbola Olahraga H
Hakim nyatakan seorang jaksa terbukti terima gratifikasi seleksi CPNS

6 Oktober 2023 16:37 WIB



Sumatera Selatan
Berkas Oknum ASN Inspektorat Sumsel Tersangka Suap Dilimpahkan ke Kejari Palembang

Irawan - detikSumbagsel

Senin, 12 Feb 2024 21:21 WIB

BAGIKAN



ANTARA

Buda



BPK RI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT

Ada Temuan Perjalanan Dinas Fiktif Rp5,03 Miliar, Bos Bapanas Buka Suara

C

medcom.id/nasional/hukum/8koagQRN-ahli-yakinkan-kerugian-negara-mencapai-rp121-m

[Home](#) [Eduverse](#) [Tekno](#) [Entertainment](#) [Lifestyle](#) [News](#) [Hype & Viral](#) [PIALA AFF](#) [Pilkada 2024](#) [Mas](#)[Index](#)[Politik](#) [Peristiwa](#) [Hukum](#) [Metro](#) [Daerah](#)[Sidang Korupsi Simulator SIM](#)

Ahli Yakinkan Kerugian Negara Mencapai Rp121 M

Renatha Swasty • 02 Maret 2015 15:54

A+

A-

medcom.id, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan total kerugian keuangan negara dalam korupsi pengadaan simulator uji klinik pengemudi roda dua (R2) dan roda empat (R4) tahun anggaran 2011 di



10 Tangkap Tangan di Tahun 2022

1		Rahmat Effendi Walikota Bekasi 2017-2022	6		Haryadi Suyuti Walikota Yogyakarta 2017-2022
2		Abdul Gafur Mas'ud Bupati Penajam Paser Utara 2018-2023	7		Mukti Agung Wibowo Bupati Pemalang 2021-2025
3		Terbit Rencana Perangin Angin Bupati Kabupaten Langkat 2019-2024	8		Karomani Rektor Universitas Lampung 2019-2023
4		Itong Isnaini Hidayat Hakim Pengadilan Negeri Surabaya	9		Sudrajad Dimyati Hakim Agung MA 2014-2022
5		Ade Yasin Bupati Bogor 2018-2023	10		Sahat Tua Wakil Ketua DPRD Prov. Jawa Timur 2019-2024



**Kasus: Pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan
di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi**

Kegiatan Tangkap Tangan: 6 Januari 2022

Abdul Gafur Mas'ud
Bupati Penajam Paser Utara
2018-2023



**Kasus: Pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Lingkungan
Pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan timur
tahun 2021-2022**

Kegiatan Tangkap Tangan: 12 Januari 2022



Kasus: Kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 s/d 2022 di Kabupaten Langkat

Kegiatan Tangkap Tangan: 19 Januari 2022

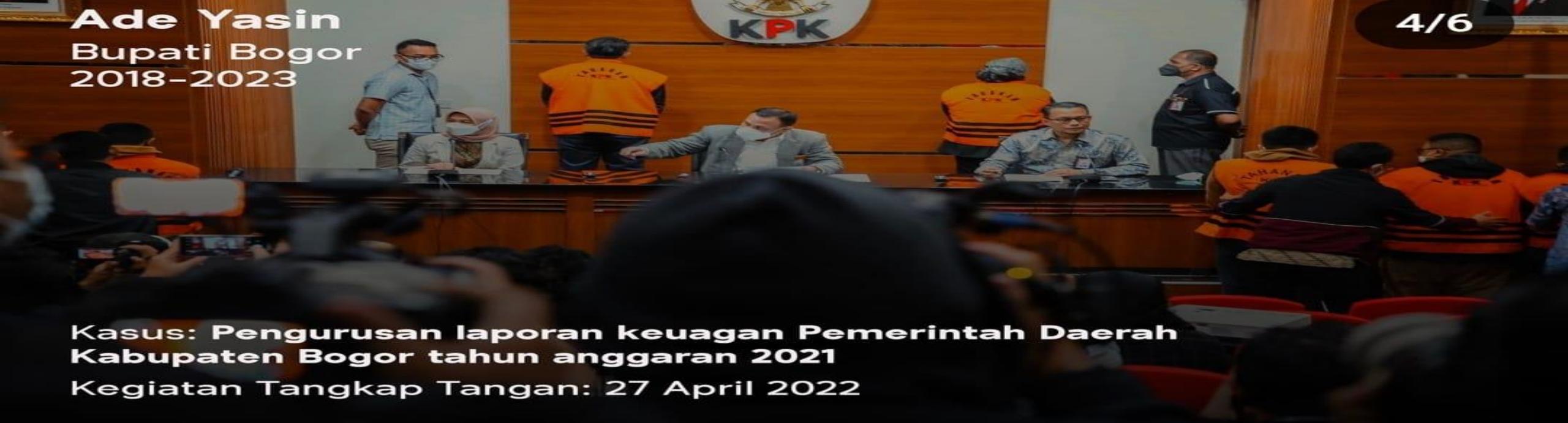
Itong Isnaini Hidayat
Hakim Pengadilan Negeri Surabaya



Kasus: Pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya

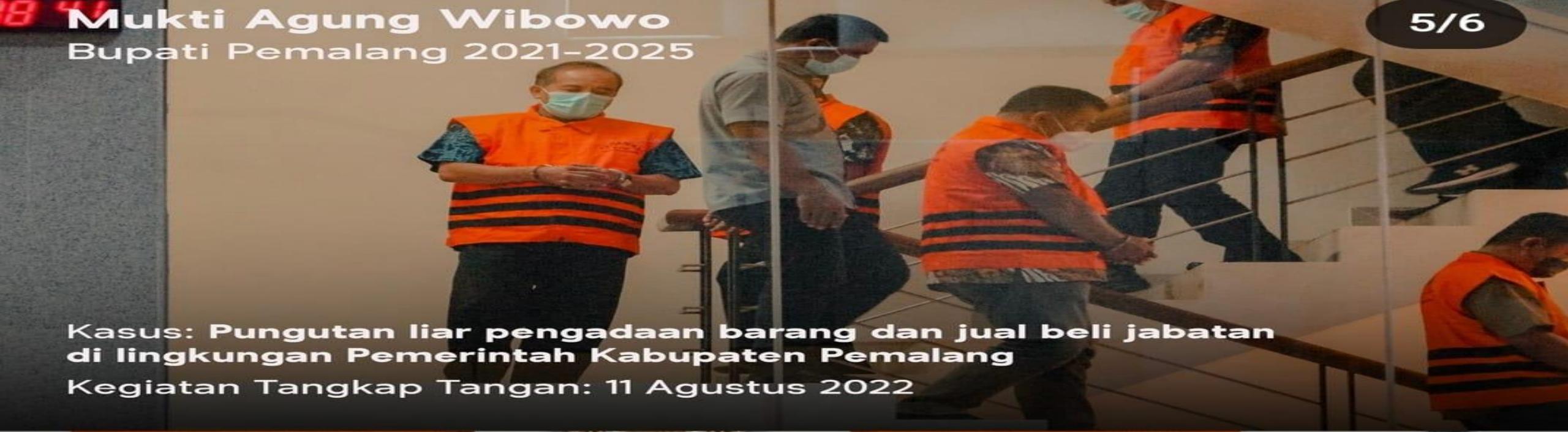
Kegiatan Tangkap Tangan: 20 Januari 2022

Ade Yasin
Bupati Bogor
2018-2023



Haryadi Suyuti
Walikota Yogyakarta
2017-2022







Kasus: Penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Agung

Kegiatan Tangkap Tangan: 23 September 2022

Sahat Tua

Wakil Ketua DPRD Prov. Jawa Timur

019-2024



Kasus: Suap pengelolaan dana hibah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Kegiatan Tangkap Tangan: 14 Desember 2022

Bola Dunia
MULTI PURPOSE
PAUERS
F4
TRUTONE
80

Korupsi Rp2,4 M, Dosen Poltran Tegal Ditahan

 Eka Setiawan · Selasa, 28 April 2015 - 19:37 WIB



1 Shares



Ada Aliran Dana Korupsi BP2TD Kalbar ke Pejabat Kemenhub untuk Karaoke dan Pijit

HiPontianak ✓

14 Maret 2023 16:26 WIB · waktu baca 3 menit

0 0 0 0 :

ANTARA > Hukum > Hukum > Bobby Mamahit didakwa terima Rp576 juta

Bobby Mamahit didakwa terima Rp576 juta

Senin, 9 Mei 2016 14:21 WIB · waktu baca 2 menit



Terbukti Terima Suap, Eks Direktur DJKA Harno Divonis 5 Tahun Penjara

Mulia Budi · detikNews

Senin, 11 Des 2023 14:13 WIB



STRATEGI PENCEGAHAN PENYIMPANGAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA (PB/J)

KEJADIAN 13 JANUARI 2016, 28 DESEMBER 2018, DAN 15 OKTOBER 2019



<https://www.liputan6.com/news/read/2612965/puluhan-pegawai-kementerian-pupr-diperiksa-kpk-soal-suap-jalan>

Bookmarks Peraturan Pemerint... ULP Kementerian P... The Important Role... AAIFI - Asosiasi Au... Proyek Strategis Na...

Puluhan Pegawai Kementerian PUPR Diperiksa KPK Soal Suap Jalan

Oscar Ferri
28 Sep 2016, 14:02 WIB

<https://www.liputan6.com/news/read/2612965/puluhan-pegawai-kementerian-pupr-diperiksa-kpk-soal-suap-jalan>

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam kasus dugaan suap jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Mereka ramai-ramai diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Amran HI Mustari, Kepala Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) IX.

"Mereka saksi untuk tersangka AHM," ucap Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK saat dikonfirmasi, Rabu (28/9/2016).

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1107634-kpk-duga-suap-proyek-air-minum-di-kementerian-pupr-sistematis

Bookmarks Peraturan Pemerint... ULP Kementerian P... Vehicles - Spintires... The Important Role... AAIFI - Asosiasi Au... Proyek Strategis Na...

KPK Duga Suap Proyek Air Minum di Kementerian PUPR Sistematis

Tim VIVA » BERITA > NASIONAL Senin, 31 Desember 2018 | 10:46 WIB

"Melihat sebaran dugaan suap terkait proyek air minum ini, dan proyek-proyek lainnya yang juga dipegang oleh WKE (PT Wijaya Kesuma Emindo) dan TSP (PT Tashida Sejahtera Perkasa), kami menduga kasus SPAM di PUPR tersebut terjadi sistematis," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Senin, 31 Desember 2018.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2019031403419-12-377138/kasus-spam-kpk-duga-aliran-suap-ke-pejabat-pupr-masif>

Bookmarks Peraturan Pemerint... ULP Kementerian P... The Important Role... AAIFI - Asosiasi Au... Proyek Strategis Na...

Kasus SPAM, KPK Duga Aliran Suap ke Pejabat PUPR Masif

CNN Indonesia | Kamis, 14/03/2019 11:06 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga aliran dana suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terjadi cukup masif. Hal ini diketahui dari banyaknya pengembalian duit terkait proyek itu ke KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan dalam kasus ini setidaknya sudah ada puluhan pejabat Kementerian PUPR yang mengembalikan uang suap, baik dari unsur saksi, maupun tersangka.

2019/10/16 23:54:31 WIB

Kepala BPJN XII Balikpapan Tersangka Suap Ditahan KPK

Ibnu Haryanto - detikNews

<https://www.detik.com/berita/d-4500000/kepala-bpjn-xii-balikpapan-tersangka-suap-ditahan-kpk>

0 komentar

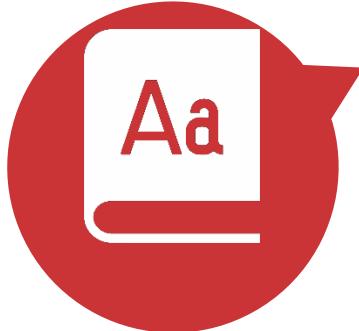
15 OKTOBER 2019

Halaman 1 dari 2

detikcom

-
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2023 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2023 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan



 **SECARA HARFIAH**
“Corruptio = Busuk”



YURIDIS

UU No. 31 Thn. 1999 jo. UU No. 20 Thn. 2001

“Setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.”

Jenis Tipikor (UU No.31/1999 Jo.UU No.20/2001)

Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor, dikelompokkan menjadi tujuh jenis besar.



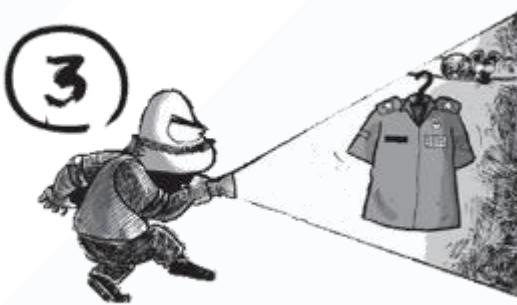
**KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA**
Ps. 2 , Ps. 3
(penyalahgunaan
wewenang)



SUAP-MENYUAP
Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b;
Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d



**KONFLIK
KEPENTINGAN
DALAM
PENGADAAN**
Pasal 12 huruf i



**PENGGELAPAN
DALAM JABATAN**
Pasal 8; 9; 10 a,b,c



PEMERASAN
Pasal 12 huruf e,f,g



**PERBUATAN
CURANG**

Ps 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h

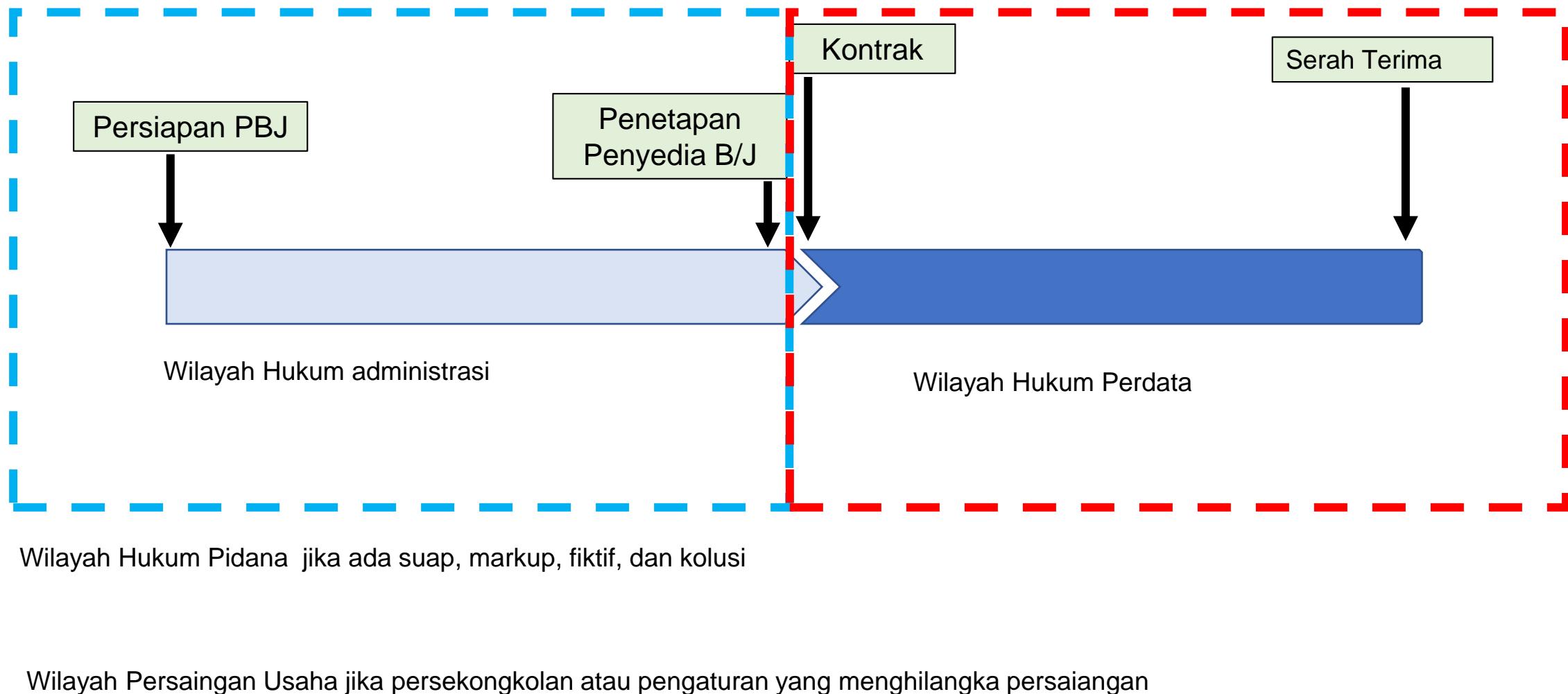


GRATIFIKASI
Pasal 12B jo Pasal 12C



- 1.Merintangi proses
- 2.Keterangan kekayaan
- 3.Keterangan rekening
- 4.Keterangan palsu
- 5.Identitas pelapor

Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa



Tuntutan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1

**Tindak Pidana
Korupsi**

2

**Tindak Pidana Pencucian
Uang (TPPU)**

3

**Tindak Pidana
Korporasi (TPK)**

**Tindak Pidana
Perpajakan**

Perdata

Persaingan Usaha

4

5

6

CONTOH KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

1

Kerugian Keuangan Negara



Perkara tipikor yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada kegiatan pengadaan dan pemasangan Six Roll Mill di Pabrik Gula Djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI selama periode tahun 2015-2016 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa BAP (Direktur Produksi PTPN XI)

2

Suap-Menyuap



Direktur Utama PT Bina Karya Raya) memberi hadiah atau janji kepada RHP selaku Bupati Mamberamo Tengah Periode 2013-2018 dan 2018-2023 terkait proyek PBJ di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah

3

Konflik Kepentingan



Penerimaan gratifikasi terkait PBJ di Pemkab Banjarnegara Tahun 2017 – 2018 atas nama Terdakwa BS (Walikota Banjarnegara) dan Terdakwa KA (Wiraswasta).

PENCEGAHAN KORUPSI PBJP

CONTOH KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

4

Gratifikasi



JRK bersama-sama TSS selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011- 2016 dan Periode 2016- 2021, dimana yang bersangkutan menerima hadiah atau janji terkait Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dari seseorang bernama IK dan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya

5

Pemerasan



kasus pemerasan biasanya terjadi secara tidak langsung, misalnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen perizinan usaha yang menjadi salah satu dokumen utama agar penyedia dapat ikut dalam proses pengadaan adalah Rp50 ribu, padahal seharusnya hanya Rp15 ribu atau malah gratis

6

Penggelapan dalam Jabatan



Misalnya penegak hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap.

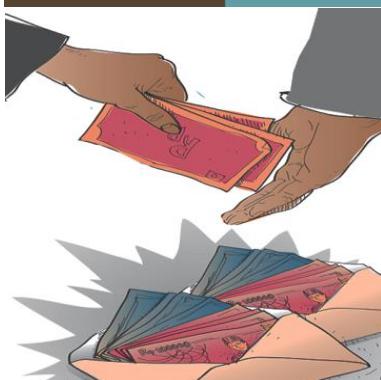
PENCEGAHAN KORUPSI PBJP

Analisis Tindak Pidana Korupsi PBJ

TAHAPAN PROSES PBJ



Sumber: Dit-Litbang KPM, 2019



MODUS OPERANDI PENYIMPANGAN PBJP

INTI MASALAH

INDIKASI

???

MARKUP

ADANYA DUGAAN HARGA PASARAN
ATAS BARANG JAUH LEbih MURAH

18

TAHAP

VOLUME PEKERJAAN KURANG

ADANYA DUGAAN ITEM/KOMPONEN
PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI
SPESIFIKASI TEKnis DALAM
KONTRAK

30

PENYIMPANGAN TPK

PEKERJAAN RAKYAT

ADANYA DUGAAN DOUBLE
ANGGARAN PAGU ANGGARAN DAN
WAKTU PELAKSANAAN YANG TIDAK
REALISTIS

140

PENYIMPANGAN

PENGENDALIAN RISIKO KORUPSI

"Strategi pengendalian risiko yang bisa dilakukan untuk memitigasi risiko korupsi pada tahapan ini adalah mengembangkan kebijakan pengadaan dan prosedur untuk mencegah korupsi pada tahap perencanaan"

1

"Men-desain"
Pengadaan sesuai
dengan aturan
perundang-undangan



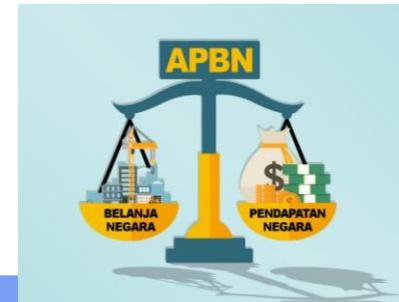
2

Transparansi dalam
Perencanaan



3

Merencanakan Anggaran sesuai
dengan kebutuhan



4

Upaya melalui kebijakan
nasional MCP



PENCEGAHAN KORUPSI PBJP

PENGENDALIAN RISIKO KORUPSI

"Strategi pengendalian risiko yang bisa dilakukan untuk memitigasi risiko korupsi pada tahapan ini adalah melakukan pemanfaatan sistem elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses tender dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan proses pemilihan. "

1

Menggunakan sistem aplikasi dalam pemilihan penyedia.

2

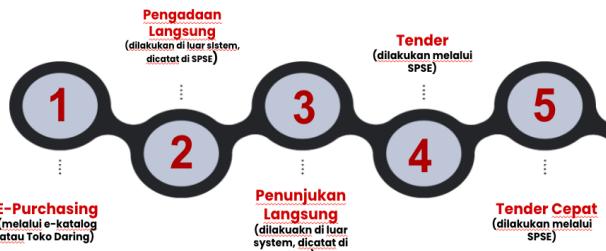
Memanfaatkan e-pengaduan untuk melaporkan pengaduan pengadaan yang tidak sesuai dengan aturan.

3

Sanksi yang tegas bagi Pelaku Pengadaan yang melakukan kecurangan dalam Proses Pemilihan Penyedia

4

Upaya melalui kebijakan nasional MCP



PENCEGAHAN KORUPSI PBJP



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

1. Yth. Kepala LKPP
2. Yth. Gubernur, Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI IMPLEMENTASI E-KATALOG

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu area rawan korupsi, sebagaimana kasus korupsi yang ditangani oleh KPK maupun yang dilaporkan terindikasi korupsi melalui pengaduan masyarakat. Untuk melakukan upaya pencegahan korupsi di area ini, maka pengadaan barang/jasa melalui implementasi e-katalog menjadi instrumen untuk pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel.



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth.
1. Para Menteri;
 2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
 3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
 4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
 5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Para Gubernur; dan
 7. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA TAHAP PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGADAAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tindak pidana korupsi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menempati peringkat kedua atas tindak pidana korupsi, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara dan menurunkan kualitas layanan publik.

Mengingat terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah besar, maka dibutuhkan pedoman dalam pencegahan korupsi.

Berdasarkan hal di atas, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Tahap Perencanaan Dan Persiapan Pengadaan.



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth.
1. Para Menteri;
 2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
 4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
 5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Para Gubernur; dan
 7. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA DAN PELAKSANAAN KONTRAK

1. Latar Belakang

Berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tindak pidana korupsi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menempati peringkat kedua atas tindak pidana korupsi, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara dan menurunkan kualitas layanan publik.

Mengingat tingginya tindak pidana korupsi yang terjadi dalam dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka dibutuhkan pedoman dalam pencegahan korupsi.



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth.
1. Para Menteri;
 2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
 3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
 4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
 5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Para Gubernur; dan
 7. Para Bupati/Walikota.



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth.
1. Para Menteri;
 2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
 4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
 5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Para Gubernur; dan
 7. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PADA TAHAP PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGADAAN

SE Nomor 5 Tahun 2024
Pencegahan Korupsi PBJP Tahap
Perencanaan dan Persiapan Pengadaan

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PADA TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA DAN PELAKSANAAN
KONTRAK

SE Nomor 8 Tahun 2024
Pencegahan Korupsi PBJP Tahap Pemilihan
Penyedia dan Pelaksanaan Kontrak

Upaya Pencegahan Korupsi Tahap Pemilihan Penyedia (*E-Purchasing*)

04

E-purchasing melalui metode Negosiasi Harga, berdasarkan Kepka LKPP 122/2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik

Contoh Pemilihan Produk melalui metode Negosiasi Harga Pilk

Nama Penyedia	Produk	Kesesuaian Spesifikasi	PDN	Nilai TKDN	UMKK	Harga Produk	Keterangan
PT. A	Produk A	Ya	Ya	35%	Ya	1000	
PT. B	Produk B	Ya	Ya	45%	Ya	1200	Prioritas Negosiasi
PT. C	Produk C	Ya	Ya	15%	Ya	950	
PT. D	Produk D	Ya	Tidak	-	Ya	925	

Pada Metode negosiasi, untuk paket pengadaan dengan nilai \geq Rp1.000.000.000,00, PPK dapat memperhitungkan Harga Evaluasi Akhir dengan Preferensi Harga

Islam:

Al-Quran:

Surat Al-Baqarah (2): 188: "Dan janganlah kamu memakan harta bendamu sendiri di antara kamu dengan cara yang batil dan janganlah kamu memberikan suap kepada para hakim agar kamu dapat menipu sebagian dari hak orang lain."

Surat An-Nisa (4): 159: "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat."

Hadits Nabi Muhammad SAW.:

"Terkutuklah orang yang menuap dan terkutuklah pula orang yang menerima suap." (HR. Abu Dawud)



Saatnya kita

"membiasakan yang benar, bukan
membenarkan yang biasa"



Untuk Yang Masih Suka Makan Yang Haram

Dari Ka'ab bin 'Ujrah radhiyallaahu 'anhu :
Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya :

"Wahai Ka'ab !
Tidak akan masuk surga orang yang
dagingnya tumbuh dari yang haram.
Neraka lebih layak untuknya".

HR Imam Ahmad dalam Musnadnya no 15284.



Yanuar Wijayanto  yanuarwe  yanuar_we  ywinstitute.com

TERIMA KASIH

Coach Dr Yanuar Wijayanto, M.T. CPEC CT CCMs CPPP CTNLP CH Cht

